

LATAR BELAKANG DAN MOTIVASI PENETAPAN STATUS
POLISI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM U.U
POKOK KEPOLISIAN (U.U. No. 13/1961)

Oleh : *Memet Tanumidjaja* *

(bagian pertama)

Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. tertanggal 1 Juli 1946 memutuskan: Kepolisian Negara R.I. dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri dan dijadikan Jawatan tersendiri dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Dengan demikian maka penetapan itu merupakan kedudukan (status) pertama yang diberikan kepada Kepolisian Negara R.I. dalam alam Kemerdekaan dan oleh sebab itu maka 1 Juli ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Kepolisian R.I. yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Status Kepolisian itu berkembang, mengalami perubahan dan penambahan dan kemudian berwujud menjadi suatu status yang tercantum dalam U.U. No. 13 tahun 1961. Perjuangan mencapai status inilah yang akan penulis ungkapkan dalam tulisan ini. Dalam pada itu ungkapan perjuangan tersebut penulis memanfaatkan pula untuk menelusur pertumbuhan pembangunan Kepolisian R.I. selama ini guna menemukan aspek-aspeknya yang berharga dan segi-seginya yang negatip. Penulis menaruh harapan besar bahwa Kepolisian R.I. akan mempergunakan ungkapan ini untuk lebih menyempurnakan hal-hal yang berharga itu dan menyingkirkan segi-segi yang negatip tadi.

Oleh karena tulisan ini selain mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari penetapan status Kepolisian R.I. juga mengkisahkan perjuangannya mencapai status itu maka dengan sendirinya pemikiran dan gagasan mengenai status tersebut yang dipajukan oleh anggota Polisi atau Persatuannya yaitu Persatuan Pegawai Polisi R.I. ikut diketengahkan.

* MEMET TUNUMIDJAJA S.H. adalah Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan

Dalam kariernya sebagai Polisi, penulis beruntung dapat mengikuti dari dekat lahirnya dan tumbuhnya pembangunan Kepolisian Republik Indonesia, sejak saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai akhir tahun 1970, diwaktu mana Penulis memasuki jajaran Purnawirawan Polisi. Peristiwa-peristiwa dan data-data dalam karangan ini sebagian besar dialami Penulis sendiri dan selainnya diambil dari buku yang disusun Penulis berjudul "Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian", yang diterbitkan tahun 1971 oleh Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan Kamanan.

Dalam Proklamasi yang pada tanggal 17 Agustus 1945 atau nama bangsa Indonesia di-ikrarkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Bangsa Indonesia secara sepihak menyatakan Kemerdekaannya. Dan lahirlah Negara Republik Indonesia yang merdeka, demokratis dan berdaulat. Dengan demikian maka jelas Negara R.I. adalah ciptaan Bangsa Indonesia sendiri dan bukan hadiah dari si penjajah. Hal ini berarti pula bahwa Aspirasi Rakyat Indonesia sendiri-lah yang menjadi sumber dan yang menentukan Pembangunan Negara dan Penyusunan Aparatur Pemerintahan. Apabila susunan lama yang berasal dari zaman Penjajahan Belanda maupun dari Penjajahan Jepang masih diberlakukan maka hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kekosongan (vakum) yang merugikan.

Pembangunan dalam tubuh organisasi Kepolisian R.I. pun mengikuti pola tersebut. Karenanya terdapat banyak perobahan-perobahan atas susunan-susunan lama disamping munculnya unsur-unsur baru. Untuk lebih jelas mengetahui apa yang berubah dan apa yang merupakan unsur-unsur baru maka perlu disajikan catatan-catatan singkat mengenai struktur, wewenang dan tata-kerja Kepolisian dizaman Hindia Belanda dan diwaktu Tanah Air kita diduduki oleh Tentara Jepang.

Kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa semangat dan suasana Revolusi Rakyat Indonesia tahun 1945 maupun Perjuangan Perang Kemerdekaan sangat berpengaruh pada Pembangunan semangat (jiwa), organisasi dan tata-kerja Kepolisian R.I Untuk

mengukur pengaruh itu dan untuk mengetahui sampai sedalam mana pengaruh itu merobah semangat (jiwa), pendirian dan sikap anggota Kepolisian R.I. maka disajikan pula uraian mengenai keadaan semangat (jiwa), pendirian dan sikap Rakyat Indonesia menjelang sesaat dan sesudah dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Struktur Organisasi, Wewenang dan Tata-kerja Kepolisian Di zaman Hindia-Belanda dan Diwaktu Pendudukan oleh Tentara Jepang.

I. *Zaman Hindia Belanda.*

Struktur organisasi Kepolisian pada umumnya tidak centralistis tetapi lebih bersifat decentralistis menurut daerah Keresidenan. Yang diatur central adalah penyelenggaraan administrasi mengenai personalia, perlengkapan dan keuangan dari satuan Polisi Umum, yang dilakukan oleh Bagian Polisi Umum di Departemen Binnenlands Bestuur (dapat disamakan dengan Dep. Dalam Negeri di Negara kita).

Dalam daerah Keresidenan terdapat satuan Polisi Umum di kota-kota dan anggota-anggota Polisi Pamongpraja di luar kota. Yang memegang pimpinan atas Polisi Umum adalah Hoofd v/h Plaatselyk Bestuur/Resident berkebangsaan Belanda dan pimpinan atas Polisi Pamongpraja adalah Bupati/Kepala Daerah berkebangsaan pribumi. Yang memegang pimpinan Polisi preventip dan represip untuk seluruh daerah Hindia-Belanda adalah Procureur General (dapat disamakan dengan Jaksa-Agung di Negara kita) di Kota Batavia (Jakarta sekarang) yang di Pusat dibantu oleh suatu Dinas Reserse Umum. Instruksi-Instruksi mengenai Kepolisian disampaikan langsung kepada Resident.

Sejak tahun 1941 satuan Marochause (satuan Tentara yang melakukan tugas Polisi Umum) diganti oleh satuan Veldpolisi yang dimasukkan dalam jajaran Polisi Umum. Wewenang, hak dan tugas Polisi dicantumkan secara terperinci dalam H.I.R. (Hukum Acara Pidana zaman Hindia Belanda yang berlaku di Negara kita sampai tahun 1982 yang baru lalu) yang diumumkan dalam Staatsblad tahun 1941 No. 044.

II. *Waktu Pendudukan oleh Tentara Jepang.*

Indonesia dibagi dalam dua lingkungan kekuasaan Pemerintahan Pendudukan yaitu:

1. Sumatra, Jawa dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara Jepang.
2. Indonesia bagian Timur dan Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut Tentara Jepang.

Pusat Kepolisian untuk Jawa dan Madura berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatra di Bukittinggi, untuk Indonesia bagian Timur di Makassar dan untuk Kalimantan di Banjarmasin.

Struktur organisasi Kepolisian pada umumnya tidak berubah daripada keadaan dizaman Hindia Belanda. Selama Pendudukan oleh Tentara Jepang terjadi beberapa perubahan yang bersifat prinsipial diantaranya seperti dibawah ini:

1. Kepolisian di Sumatra, Jawa dan Madura dipimpin oleh Cianbucho (Kepala Bagian Keamanan) di Kantor Gunseikan (Kepala Pemerintahan Pendudukan daerah Sumatra, Jawa dan Madura) di Jakarta. Secara hierarchis dia membawahi Cianbucho (Kepala Bagian Keamanan) dari Kantor Syuchokan (kepala Pemerintahan Pendudukan se Karesidenan.)
2. Urusan Kepolisian dan Kejaksanaan dipersatukan dalam satu tangan yaitu di tangan Chianbucho tersebut di atas.
3. Pamong-Praja tidak diberi wewenang Kepolisian, tidak berwenang menangkap dan menyidik orang.
4. Pimpinan atas organisasi Keibodan (semacam Hansip) dipegang oleh Kepolisian.
5. Latihan kemiliteran di Kepolisian lebih ditingkatkan. Hasilnya anggota Polisi dalam tindak dan sikapnya menjadi militan.
6. Dalam tubuh organisasi Kepolisian dibentuk satuan baru yaitu Pasukan Tokubetsu Keisatsutai (Polisi Istimewa) yang merupakan Pasukan Tempur guna membantu dan memperkuat Satuan Polisi Umum.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut diatas dizaman Pendudukan Tentara Jepang, Polisi Umum menjadi satu-satunya apparatus Pemerintahan yang mempunyai wewenang Kepolisian jauh berbeda dengan keadaan di zaman Hindia-Belanda dan me-

nyimpang dari ketentuan dalam H.I.R. (Staatsblad 1941 No. 44).

Semangat (Jiwa) dan Sikap Bangsa Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejak Tentara Jepang menginjakkan kakinya di atas bumi Indonesia mereka tiada henti-hentinya berdaya-upaya agar bangsa Indonesia memihak mereka dan membantu gerak perangnya. Salah usahanya adalah memberikan isyarat berselimumkan janji bahwa di waktu dekat Indonesia akan dimerdekakan walaupun beberapa tindakan seperti diantaranya larangan mengenai kegiatan politik jelas menunjukkan bahwa janji itu muslihat belaka. Tetapi muslihat itu toch dapat menggerakkan Bangsa Indonesia untuk memasuki latihan-latihan kemiliteran, yang diadakan oleh Pemerintahan Pendudukan sampai jauh ke pelosok-pelosok desa. Pegawai Negeripun tua-muda pria-wanita diharuskan mengikuti latihan-latihan itu. Semangat untuk berlatih kemiliteran sedemikian menyebarkan luasnya sehingga dapat dikatakan segenap lapisan Masyarakat Indonesia menjadi militan dan matang untuk melakukan suatu revolusi.

Berkobarnya semangat itu bukan karena terdorong oleh hasrat untuk membantu Tentara Jepang akan tetapi karena tergerak oleh harapan dan anggapan bahwa Tanah Air Indonesia dalam waktu dekat segera akan Merdeka. Dengan adanya semangat itu maka pembentukan satuan Keibodan (semacam Hansip) dan satuan Seinendan (pasukan Pemuda) berjalan lancar dan tumbuh dimana-mana. Ditiap Kabupaten pembentukan Batalyon Pasukan Pmbela Tanah Air (Peta) yang dipersenjatai secara lengkap sebagai suatu satuan Tempur, juga tidak menemui kesulitan. Tokoh-tokoh masyarakat seperti umpamanya pemimpin organisasi massa alim-ulama dan pemimpin agama maupun para cendekiawan seperti sarjana, guru, pamongpraja dan pegawai negeri banyak yang menjadi perwira satuan-satuan Peta ini. Dalam pada itu karena Pemerintah Pendudukan membuka kesempatan untuk menjadi Polisi maka banyak pemuda-pemuda militan masuk memperkuat Polisi Umum dan Pasukan Polisi Istimewa.

Adanya tindakan-tindakan Pemerintah Pendudukan yang bertentangan dengan janjinya akan memerdekakan Indonesia ditambah pula dengan sering terjadinya tindakan Tentara Jepang yang

melanggar kesopanan dan menyakitkan hati maka dalam masyarakat luas lambat-laun tumbuh perasaan benci terhadap bangsa Jepang. Dari hari ke hari perasaan benci ini meningkat terus dan sebagai puncaknya meletuslah perlawanan Rakyat dan pembontakan Bersenjata, seperti Perlawanan Rakyat Petani di daerah Indramayu (Jawa Barat), pembontakan di suatu Pesantren di daerah Singaparna dan pembontakan bersenjata dari Dai dan Peta di daerah Blitar (Jawa Timur). Sebagai reaksi terhadap keadaan itu maka Pemerintah Pendudukan lebih ketat lagi dalam mengekang kehidupan politik dan kemudian membubarkan satuan-satuan Peta.

Demikianlah suasana Masyarakat Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan yang dicituskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gambaran suatu Masyarakat yang sedang bergolak, yang diliputi oleh perasaan yang menegangkan yaitu harapan akan datangnya Kemerdekaan setiap waktu dan yang terbakar oleh perasaan benci terhadap bangsa Jepang yang sedang berkuasa.

Periode Sesaat, Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan tanda permulaan daripada Revolusi Rakyat Indonesia. Setelah lama menantikan datangnya Kemerdekaan dengan perasaan yang tidak sabar maka Bangsa Indonesia menyambut pernyataan Proklamasi Kemerdekaan itu dengan ledakan emosi yang meluap-luap. Luapan emosi ini, yang tidak mungkin dapat dibendung, menuntut pelaksanaan secara nyata daripada pemindahan kekuasaan sebagaimana tercantum dalam diktum Proklamasi Kemerdekaan. Rakyat tidak senang melihat Bangsa Jepang masih melakukan Kekuasaan sehari-hari. Maka dari itu dengan tidak menunggu lagi instruksi dari Pusat Pemerintahan R.I. di Jakarta, Rakyat di Daerah bertindak merealisasikan pemindahan kekuasaan dari Pemerintahan Pendudukan kepada Pemerintah R.I.

Keanehan dalam proses ini adalah bahwa pemindahan kekuasaan yang terjadi di semua ibu-kota Karesidenan ternyata berjalan menurut suatu pola yang hampir sama seakan-akan seperti di atur oleh satu tangan dari Pusat. Begitulah pola itu: Dalam suatu Rapat Umum yang dihadiri oleh beribu-ribu orang maka massa Rakyat

memproklamkan Daerahnya menjadi Daerah Republik Indonesia dan kemudian menunjuk seorang Pemimpin menjadi Kepala Pemerintah Daerah. Kemudian massa Rakyat secara beramai-ramai mendatangi rumah Syuchokan (Kepala Pemerintahan Pendudukan berkebangsaan Jepang) atau Markas Tentara Jepang untuk menuntut pemindahan Kekuasaan dan penyerahan senjata dari pihak Jepang kepada Pemerintah R.I. Oleh karena aksi Rakyat ini hampir di mana-mana berhasil maka pemindahan Kekuasaan dan pembentukan Pemerintah R.I. di daerah-daerah telah dapat diselesaikan pada akhir bulan Agustus 1945..

Kekuatan aksi Rakyat tersebut diatas terletak pada adanya backing senjata api. Satuan-satuan Peta, yang lengkap persenjataannya menjelang Proklamasi Kemerdekaan telah dibubarkan dan hanya Polisilah yang oleh Jepang masih diperbolehkan memegang senjata api. Pada waktu aksi Rakyat membutuhkan backing maka satuan Polisi dengan tidak ragu-ragu memberikannya. Tindakan ini ternyata besar pengaruhnya pada waktu akan membentuk Kepolisian Republik Indonesia. Pada waktu itu tindakan pemberian backing kepada aksi Rakyat dinilai sebagai suatu bukti bahwa satuan Polisi tersebut walaupun formil masih merupakan satuan Polisi dari Pemerintahan Pendudukan sudah menjadi pendukung daripada Negara R.I. Itulah sebabnya mengapa pada waktu akan membentuk Kepolisian R.I. satuan Polisi tadi tidak dibubarkan tetapi malah dikukuhkan menjadi Kepolisian Republik Indonesia.

(bersambung)



*The Wise old owl
A wise old lived in an oak.
The more he saw less he spoke.
The less he spoke the more he heard.
Why can't we all be like that bird???*